BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih mengacu kepada pola *retributive justice* yang tujuannya menentukan siapa yang disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak pidana.
2. Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik maupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan alternatif yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Terkait dengan penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE, alternatif yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk pada putusan terdahulu dengan mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* sehingga penyelesaian perkara pencemaran nama baik tidak selalu berakhir pada pemidanaan pelaku tindak pidana.
2. Terkait dengan gagasan mengenai ketentuan pencemaran nama baik yang baru. Alternatif yang dapat dilakukan bagi pembentuk Undang-Undang adalah dengan menambahkan rumusan pencemaran nama baik yang dilakukan menggunakan sarana elektronik ke dalam Pasal 537 rancangan KUHP tentang pencemaran nama baik. Penambahan ketentuan Pasal 537 bertujuan untuk menjangkau tindak pidana pencemaran nama baik maupun pencemaran nama baik melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian
Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Hamzah, Andi, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Yogyakarta

Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai
Pustaka, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Universitas
Atmajaya, Yogyakarta

Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, esdisi VI, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia, Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wisnubroto ,Al., 2010, *Strategi penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Agung No.822k/Pid.Sus/2010, atas nama terdakwa Prita
Mulyasari

Putusan Mahkamah Agung No.22 PK/Pid.Sus/2011, atas nama terdakwa Prita
Mulyasari

Putusan Mahkamah Agung No.300/K/Pdt/2010,atas nama Prita
Mulyasari melawan RS. Omni Internasional

Putusan Pengadilan Tinggi BantenNo.151/PID/2012/PT.BTN,atas nama terdakwa dr
Ira Simatupang Sp.OG

Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.71/Pdt/2009/PT.BTN,atas nama Prita
Mulyasari melawan RS. Omni Internasional

Putusan Pengadilan Negeri KendalNo.232/Pid .B/2010/PN.Kdl,atas nama terdakwa
Drs Prabowo

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1269/PID.B/2009/PN.TNG,atas nama
terdakwa Prita Mulyasari

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.236/Pid.Sus/2012/PN.TNG, atas nama
terdakwa dr Ira Simatupang Sp.OG

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2008/TNG, atas nama Prita
Mulyasari melawan RS. Omni Internasional

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tahun 2012)

Internet

[http://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi
komunikasi-bag-2/](http://zamrishabib.wordpress.com/2008/11/13/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi-bag-2/) diakses minggu 18/3/2012 pukul 11.00 WIB

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=DEFINISI%20PENGERTIAN%20DAN%20JENIS%20CYBERCRIME%20BERIKUT%20MODUS%20OPERANDINYA&&nomorurut_artikel=353; 20 maret 2012